

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kecurangan di Indonesia sangat berpengaruh bagi masyarakat umumnya, salah satu contoh kecurangan tersebut adalah korupsi. Korupsi bagaikan suatu berita yang tidak aneh di kalangan masyarakat, kecurangan tersebut dilakukan untuk menipu orang lain agar mereka tidak mengalami kerugian, dengan kata lain pihak yang melakukan kecurangan ingin mendapatkan keuntungan yang bersifat individu. Hampir disemua lini pemerintahan terjadi perilaku korupsi, dan bahkan orang sudah menganggap korupsi sebagai hal yang wajar dan tanpa disadari telah menyebabkan keterpurukan bangsa yang membuat rakyat menjadi menderita.

Pengusutan tindak pidana kecurangan dan korupsi ini dapat dibantu oleh auditor investigatif yang akan melakukan audit investigasi. Oleh karena itu, diperlukan auditor investigatif yang memiliki kemampuan memadai agar dapat mengungkap suatu kecurangan yang terjadi. Pengusutan tindak kecurangan yang dilakukan diluar bidang hukum pengadilan dapat juga dibantu oleh seorang yang ahli dibidangnya, salah satunya yaitu auditor. Bantuan yang diberikan adalah berupa audit investigasi. Audit investigasi berhubungan dengan pengujian dan analisis forensik dalam pengumpulan bukti dengan menggunakan teknik investigasi dan teknik-teknik audit yang kemudian akan digunakan dalam perkara pengadilan. Oleh karena itu, pada auditor investigasi

diperlukan kualitas keterampilan dan keahlian kasus yaitu kombinasi antara auditor berpengalaman dan auditor penyidik kriminal. (Karyono, 2013:127).

Audit Investigatif berkembang di Indonesia secara perlahan dan digunakan untuk memecahkan berbagai kasus korupsi atau kejahatan ekonomi lainnya hingga kini. Titik berat audit investigatif adalah upaya untuk penegakan supermasi hukum terkait *fraud* yang muncul dengan metode investigasi.

Dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan audit investigasi kecurangan, maka auditor investigatif harus memiliki kemampuan untuk membuktikan adanya kecurangan yang kemungkinan terjadi dan sebelumnya telah terdeteksi oleh berbagai pihak. Efektivitas pelaksanaan audit investigasi kecurangan tercermin dari kemampuan auditor yang diiringi dengan banyaknya pengalaman auditor tersebut dalam mengungkapkan berbagai kasus kecurangan yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar umum yang sudah ditentukan serta mengaplikasikan metode pelaksanaan pemeriksaan audit investigasi dan teknik-teknik pengungkapan kecurangan dengan benar sehingga menghasilkan bukti audit yang reliable dan relevan untuk dijadikan barang bukti di pengadilan.

Fenomena mengenai kasus yang melibatkan kredibilitas auditor BPKP dengan maraknya kasus korupsi di negeri ini sudah merajalela dari tingkat pejabat tinggi negara hingga sampai ketinggian daerah, yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya tentu melibatkan beberapa unsur-unsur dari berbagai pihak eksekutif, legislatif maupun yudikatif dengan memberikan informasi yang

akurat dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga uang negara dapat terselamatkan demi kepentingan masyarakat secara meluas.

Kejaksaan Negeri Bale Bandung Melalui Kasie Pidsus Andri Juliansyah, SH melakukan penyelidikan beberapa dinas/instansi diwilayah Kabupaten Bandung seperti; Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dugaan adanya penyalahgunaan dan swakelola dalam pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir 29 SD diwilayah Kabupaten Bandung, begitu juga di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) penyalahgunaan dana hibah/bansos dari APBD Kabupaten Bandung tahun 2012 pada pengadaan Venue paralayang dan Gantole di kawasam Kawah Putih, adanya dugaan penyalahgunaan dana untuk rekayasa jalan pada Dinas Perhubungan pada anggaran tahun 2012-2013 yang bersumber dari DAK serta dugaan adanya penyalahgunaan dana APBD anggaran tahun 2012 pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.

Namun dari beberapa tahap penyelidikan Tindak Pidana Khusus (Pidsus) di kejaksaan Negeri Bale Bandung masih menunggu hasil audit pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, bahkan sampai saat ini pihak BPKP belum ada kejelasan atau lamban alias memble dalam mengadakan audit pemeriksaan, sehingga memperlambat pihak kejaksaan Negeri Bale Bandung dalam menindaklanjuti perkara Pidsus diwilayah Kabupaten Bandung tersebut.

Pihak BPKP Provinsi Jawa Barat sampai saat ini belum memberikan laporan hasil audit pemeriksaan padahal pihak dari Kejaksaan Negeri Bale

Bandung sampai saat ini masih menunggu dan menunggu laporan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran negara yang dilakukan oleh beberapa dinas/institusi yang ada di wilayah Kabupaten Bandung (Hendar:2014).

Adapun fenomena mengenai kasus yang sama yakni melibatkan kredibilitas auditor BPKP yaitu Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bersama Indonesian Corruption Watch (ICW) telah melaporkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh ke BPKP Pusat. Hal ini dilakukan karena kinerja audit dalam kurun waktu 2014 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Aceh terhadap perkara tindak pidana korupsi terkesan lamban bahkan mengulur-ngulur waktu.

Laporan MaTA dan ICW disampaikan langsung kepada Kepala BPKP Pusat, Mardiasmo pada 20 Oktober silam. Dalam laporan tersebut, MaTA dan ICW meminta klarifikasi dan juga mendesak BPKP Pusat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja BPKP Perwakilan Aceh khusus yang berkaitan dengan audit perhitungan kerugian Negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan monitoring MaTA dalam kurun waktu tahun 2014, terdapat 10 kasus indikasi tindak pidana korupsi yang masih menunggu keluar hasil audit dari BPKP Perwakilan Aceh. Jika dilihat, kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang berpotensi melibatkan pejabat-pejabat tinggi dilingkungan pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh.

Sesuai dengan catatan MaTA di tahun 2013, terdapat perkara korupsi pada pengadaan Alkes RSUD Cut Meutia Aceh Utara tahun 2012 yang divonis bebas. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh beralasan bahwa dalam

perkara ini karena tidak ada hasil audit yang memperkuat potensi kerugian Negara.

Padahal, jika dilihat dari versi Jaksa, kerugian dalam kasus ini mencapai Rp. 3,4 miliar dari total anggaran Rp. 25 miliar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012. Tentunya ini menjadi catatan buruk dalam penegakan hukum kasus korupsi di Aceh.

Selain itu, berdasarkan pantauan MaTA selama ini sering terjadi miskordinasi antara penyidik dengan auditor BPKP Perwakilan Aceh. Penyidik mengakui semua data-data yang dibutuhkan oleh auditor sudah diserahkan sementara pihak auditor beralasan data-data yang diberikan belum lengkap, padahal gelar perkara terhadap kasus tersebut sudah beberapa kali dilakukan. Disamping itu, selama ini MaTA juga sering mendapatkan laporan dari penyidik, baik ditingkat kepolisian maupun kejaksanaan terhadap lambannya proses audit. Penyidik mengakui ini merupakan kendala dalam percepatan pengungkapan tindak pidana korupsi di Aceh. Oleh karena itu, MaTA berharap dengan laporan ini dapat memperbaiki kinerja audit BPKP Perwakilan Aceh (Ipul:2014).

Berdasarkan fenomena tersebut mencerminkan bahwa adanya keraguan masyarakat terhadap hasil audit yang dilakukan BPKP dikarenakan pengalaman auditor yang kurang sehingga kemampuan seorang auditor dalam menangani kasus kurang sehingga audit investigatif yang seharusnya dilakukan dengan tepat waktu menjadi tidak efektif dan terkesan lamban. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa dalam proses pengungkapan fraud oleh BPKP tersebut tidak efektif dan tidak sesuai harapan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari jurnal karya ilmiah yang dilakukan oleh Rahmayani, Kamaliah dan Susilatri (2014). Perbedaan dengan penelitian ini, penelitian sebelumnya berjudul pengaruh kemampuan auditor, skeptisme, profesional auditor, teknik audit dan *whistleblower* terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi kecurangan sedangkan penelitian ini berjudul kemampuan auditor dan pengalaman auditor terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif dan indikator yang digunakan berbeda dengan indikator sebelumnya. Adapun penelitian Mulyati, Pupung dan Hendra (2015). Perbedaan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya berjudul pengaruh kemampuan auditor investigatif dan pengalaman auditor terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan sedangkan penelitian ini variabel dependennya yaitu efektivitas pelaksanaan audit investigatif dan indikator yang digunakan berbeda dengan indikator sebelumnya.

Setelah ditelaah oleh peneliti, dari berbagai kasus kecurangan, korupsi dan lain-lain disebabkan oleh kurangnya kemampuan auditor dan pengalaman auditor itu sendiri sehingga terjadi berbagai kasus kecurangan di Indonesia, karena itu *Transparency International (TI)*-Indonesia mendorong agar melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi korupsi dan kecurangan, salah satunya dengan peyidikan dan penindakan kasus-kasus korupsi dan

kecurangan harus terus didorong baik oleh pihak yang berkaitan maupun oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka hal ini menarik peneliti untuk mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Kemampuan Auditor dan Pengalaman Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigatif.”**

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka secara khusus penelitian ini ingin menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kemampuan auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana pengalaman auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan audit investigatif pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
4. Seberapa besar pengaruh kemampuan auditor dan pengalaman auditor secara simultan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

5. Seberapa besar pengaruh kemampuan auditor dan pengalaman auditor secara parsial terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Maksud penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan audit investigatif, serta untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki seorang auditor dan pengalaman auditor untuk dapat melakukan audit investigasi yang efektif. Sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui kemampuan auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengalaman auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan audit investigatif pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kemampuan auditor dan pengalaman auditor secara simultan terhadap efektivitas pelaksanaan



audit investigatif pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kemampuan auditor dan pengalaman auditor secara parsial terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan teoritis**

- a. Diharapkan dapat memberikan pengembangan atas teori di bidang auditing khususnya di bidang kemampuan auditor dan pengalaman auditor dalam efektivitas pelaksanaan audit investigatif.
- b. Diharapkan sebagai pengembangan teori dari penelitian sebelumnya.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi sejumlah BPKP dalam hal auditing khususnya audit investigasi.

- b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi auditor investigatif terhadap kemampuannya dalam pelaksanaan audit investigatif.
- c. Dapat digunakan sebagai masukan bagi para auditor dalam pelaksanaan pekerjaannya.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti melakukan penelitian pada September 2016 s/d selesai.